



Tambah Pekerja dan Jam Kerja

■ Realisasi Proyek Gedung Lantai III DPRD Klungkung Baru 25 Persen

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Proyek pembangunan gedung berlantai tiga di Kantor DPRD Klungkung baru berjalan sekitar 25 persen. Padahal pekerjaan proyek tersebut harus rampung per 18 November 2017 nanti. Pihak pelaksana yaitu PT Jaya Konstruksi Engineering mencari solusi, sehingga proyek tidak molor dan selesai tepat waktu.

"Kami sudah rapat dengan pihak konsultan, dan kami sudah ada strategi percepatan untuk menyelesaikan gedung ini tepat pada waktunya," jelas pihak pelaksana proyek, Bahtiar ketika ditemui *Tribun Bali*, Senin (11/9).

Strategi percepatan pembangunan tersebut dilakukan dengan cara penambahan jumlah pekerja dan jam kerja. Jumlah tenaga kerja yang awalnya berjumlah 18 orang, ditambah menjadi 30 pekerja. Sementara, para pekerja yang biasanya bekerja mulai pukul 08.00 Wita-17.00 Wita, ditambah hingga pukul 21.00 Wita.

"Jadi para pekerja itu lembur menyelesaikan pembangunan. Nanti tentu para pekerja akan ada uang lemburnya," jelas Bahtiar

Ia menjelaskan, lantaran bersamaan dengan hari raya, maka pelaksanaan proyek menjadi agak terlambat dimulai. Proyek tersebut dimulai 22 Juni 2017 dan harus rampung per 18 November 2017.

"Pokoknya kita optimistis proyek ini akan rampung tepat pada waktunya, walau sempat ada keterlambatan ketika dimulai. Kami selalu optimistis dalam bekerja," jelasnya.

Sekwan Klungkung I Wayan Sugiarta menjelaskan, proyek pembangunan gedung baru DPRD tersebut menelan anggaran hingga Rp 2,2 miliar. Bangunan tersebut dibangun dengan tiga lantai. Lantai bawah akan dimaksimalkan pembangunan garasi bagi anggota dewan, Di atasnya ruang komisi. Sementara untuk bangunan lama akan dimaksimalkan untuk ruang staf DPRD. (mit)



Tersangka Korupsi Dana PNPM Diserahkan ke Kejaksaan

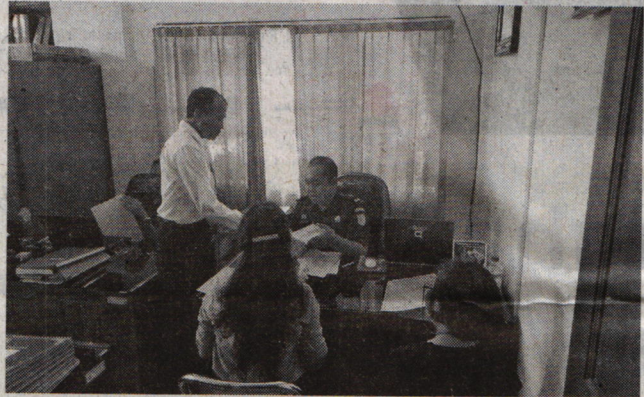
TABANAN, TRIBUN BALI – Kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Pupuan, Tabanan dengan tersangka LSD alias Bu Wibi (53) asal Pupuan oleh penyidik Tipikor Reskrim Polres Tabanan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan.

Penyerahan itu karena penyidik telah merampungkan penyelidikan, pada pelimpahan tahap dua itu tersangka beserta barang bukti dibawa ke kejaksaan pada Senin (11/9).

Kasubag Humas Polres Tabanan AKP I Putu Oka Suyasa alias IPO mengungkapkan, tersangka LSD selaku bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Kecamatan Pupuan, telah dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau memperkaya suatu korporasi yang dapat menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara.

Perbuatan tersebut dilakukan tersangka LSD selaku bendahara UPK Kecamatan Pupuan, dalam mengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk Program Simpan Pinjam dari 2008 hingga 2012.

LSD tidak berpedoman dengan aturan yang berlaku atau menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP)



ISTIMEWA

TERSANGKA – Sejumlah petugas saat penyerahan tersangka dugaan korupsi PNPM Kecamatan Pupuan di Kejaksaan Negeri Tabanan, Senin (11/9).

yang berlaku di UPK Kecamatan Pupuan. Caranya dengan mencairkan kredit kepada kelompok tidak dilengkapi proposal dan kelompok tersebut sudah lunas membayar angsuran namun masih tercatat mempunyai utang.

“Menerima pembayaran angsuran di rumahnya dan tidak mencatatkan pada pembukuan UPK dan tidak menyetorkan uangnya ke kas UPK Pupuan,” kata AKP Suyasa.

Sesuai hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Bali ditemukan adanya kerugian negara Rp 164.455.500. Rinciannya, pembayaran angsuran kredit fiktif tidak disetor ke kas UPK se-

sar Rp 75.330.000. Pembayaran angsuran anggota kelompok tidak disetor ke Kas UPK sebesar Rp 89.125.500.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan Tabanan IB Alit Ambara Pidada, saat dikonfirmasi membenarkan pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Pupuan.

Dijelaskan, pihaknya menyatakan berkas kasus tersebut sudah P21 atau lengkap. Dengan demikian penyidik Polres menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke penyidik Pidsus Kejari Tabanan. “Tersangka langsung ditahan dan kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor,” jelasnya. (arg)

Edisi : Selasa, 12 September 2017

Hal : A